

Implementasi SIPD dalam Mendukung Relevansi Laporan Pengelolaan Anggaran di Dispota Kabupaten Gianyar

Gusti Ayu Monika⁽¹⁾

I Wayan Sudiana⁽²⁾

Ni Made Wisni Arie Pramuki⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia, Denpasar
 e-mail: ayumonika94@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Regional Government Information System (SIPD), its contribution to enhancing the relevance of budget management reports, and the challenges encountered during its application at the Department of Youth and Sports (Dispota) of Gianyar Regency. A descriptive qualitative approach was employed to gain an in-depth understanding of the phenomenon. Data were obtained through observations, in-depth interviews with key informants, and documentation review. The analysis followed the interactive model of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that SIPD has been applied throughout the entire budget management cycle, including planning, execution, and reporting processes. The system improves the relevance of financial reports by providing information that supports feedback, predictive insights, and timely decision-making. Nevertheless, its implementation is not without limitations, particularly related to human resource competencies, technical system disruptions, and reliance on stable internet access. Overall, SIPD contributes positively to improving the relevance of budget management reports; however, continuous system refinement and capacity building are required to achieve optimal performance.

Keywords: SIPD, budget reporting, information relevance, public sector, local government

PENDAHULUAN

Akuntabilitas pengelolaan anggaran mencerminkan kewajiban organisasi dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya keuangan secara transparan, efisien, dan sesuai ketentuan (Hasibuan, 2022). Hal ini tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup kualitas pelaksanaan anggaran secara keseluruhan. Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban dari sisi keuangan maupun kinerja. Selain itu, penerapan sistem informasi akuntansi yang tepat diyakini mampu memperkuat akuntabilitas melalui penyediaan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses (Septiani, 2025).

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berfungsi sebagai sarana untuk mengelola data keuangan menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan (Puspitasari, 2023). Sistem ini mendukung aktivitas operasional organisasi melalui penyajian informasi yang

Dalam praktiknya, permasalahan relevansi informasi masih ditemukan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gianyar, seperti adanya ketidaksesuaian antara data laporan dengan kondisi aktual serta keterlambatan penyajian informasi. Hal ini mengindikasikan

bahwa informasi yang dihasilkan belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pengambilan keputusan. Temuan awal juga menunjukkan adanya kendala teknis, seperti gangguan sistem dan keterlambatan sinkronisasi data, yang berdampak pada kualitas laporan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIPD, mengkaji perannya dalam mendukung relevansi laporan pengelolaan anggaran, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gianyar. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akuntansi sektor publik, khususnya terkait hubungan antara sistem informasi pemerintah dan kualitas informasi laporan keuangan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan SIPD guna meningkatkan kualitas informasi dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem informasi merupakan komponen penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan organisasi, termasuk di sektor publik. Salah satu model yang banyak digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem informasi adalah *Information System Success Model* yang dikembangkan oleh DeLone dan McLean. Model ini menjelaskan bahwa keberhasilan sistem informasi ditentukan oleh kualitas sistem, kualitas informasi, tingkat penggunaan, kepuasan pengguna, serta manfaat yang dihasilkan bagi organisasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, model ini relevan untuk memahami sejauh mana sistem informasi mampu menghasilkan informasi yang berkualitas dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berperan dalam mengolah data keuangan menjadi informasi yang dapat digunakan oleh manajemen. SIA mencakup berbagai komponen yang saling terintegrasi, seperti perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, data, dan sumber daya manusia. Keberadaan sistem ini memungkinkan penyajian informasi keuangan yang lebih akurat, terstruktur, dan mudah diakses. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi yang tepat dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan serta mendukung akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem berbasis elektronik yang dikembangkan untuk mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah. SIPD bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan melalui penyediaan data yang terpusat dan terstandarisasi. Dengan adanya integrasi sistem, diharapkan

proses pengelolaan anggaran menjadi lebih sistematis serta meminimalkan terjadinya kesalahan atau inkonsistensi data.

Kualitas laporan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh aspek akuntabilitas, tetapi juga oleh relevansi informasi yang dihasilkan. Informasi dikatakan relevan apabila mampu memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan, baik melalui nilai umpan balik (*feedback value*), nilai prediktif (*predictive value*), maupun ketepatanwaktuan penyajian (*timeliness*). Relevansi informasi sangat dipengaruhi oleh kualitas data dan sistem yang digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Namun demikian, berbagai kendala masih sering ditemukan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketidakstabilan sistem, serta kurang optimalnya pemanfaatan fitur yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem informasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi dalam mengimplementasikannya secara efektif.

Berdasarkan kajian teoritis dan penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa implementasi SIPD memiliki potensi dalam meningkatkan relevansi laporan pengelolaan anggaran. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem, kemampuan pengguna, serta kondisi teknis yang mendukung. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji secara lebih mendalam implementasi SIPD dalam mendukung relevansi laporan pengelolaan anggaran pada instansi pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam mendukung relevansi laporan pengelolaan anggaran. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara kontekstual berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Objek penelitian ini adalah implementasi SIPD pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gianyar. Subjek penelitian terdiri dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran dan penggunaan SIPD, seperti kepala sub bagian keuangan dan operator SIPD. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami proses implementasi SIPD dalam kegiatan

operasional. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan kunci untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif terkait implementasi sistem, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap relevansi laporan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa laporan keuangan, dokumen anggaran, serta arsip yang berkaitan dengan penggunaan SIPD.

Model penelitian ini berfokus pada hubungan antara implementasi SIPD dan relevansi laporan pengelolaan anggaran. Relevansi informasi diukur melalui tiga indikator utama, yaitu nilai umpan balik (*feedback value*), nilai prediktif (*predictive value*), dan ketepatanwaktuan (*timeliness*).

Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar memudahkan pemahaman. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap berdasarkan temuan yang diperoleh selama proses penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gianyar merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 sebagai tindak lanjut dari regulasi nasional di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Dinas ini memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, termasuk pembinaan serta peningkatan prestasi melalui pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel.

Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gianyar adalah mewujudkan pemuda dan masyarakat olahraga yang berprestasi, berkarakter, dan berdaya saing. Untuk mencapai visi tersebut, dinas memiliki misi antara lain meningkatkan kualitas dan kemandirian pemuda serta mengembangkan pembinaan olahraga berprestasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting, yaitu Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, serta Operator SIPD. Masing-masing pihak memiliki tugas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran.

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Tabel 1. Analisis Data Model Miles & Huberman

Informan	Hasil Wawancara	Reduksi Data	Penyajian Data	Kesimpulan
I1 (Kepala Dinas)	SIPD digunakan dalam pengelolaan program dan anggaran pada Dispora	SIPD digunakan sebagai sistem utama dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran	Implementasi SIPD telah diterapkan dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran	SIPD mendukung pengelolaan data kegiatan secara terintegrasi
I2 (PPK)	SIPD mempermudah pengelolaan data keuangan dan monitoring kegiatan	SIPD mempermudah pengelolaan data keuangan dan monitoring kegiatan	SIPD membantu pengawasan pengelolaan anggaran	SIPD meningkatkan efisiensi pengelolaan data keuangan
I4 (Bendahara Pengeluaran)	Realisasi anggaran dicatat melalui SIPD	SIPD digunakan untuk pencatatan realisasi anggaran	Sistem membantu pencatatan transaksi keuangan	SIPD mendukung pencatatan keuangan yang lebih sistematis
I5 (Operator SIPD)	Operator menginput data kegiatan dan dokumen dalam sistem SIPD	Input data kegiatan dilakukan melalui SIPD	Data kegiatan dan anggaran diinput secara sistematis	SIPD berfungsi sebagai sistem pengelolaan data kegiatan
I3 (PPTK)	SIPD digunakan dalam seluruh siklus kegiatan (perencanaan hingga realisasi), mendukung penyusunan laporan kegiatan, Data terintegrasi dalam satu sistem	SIPD digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan kegiatan.	Penggunaan SIPD membantu pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan secara sistematis, mulai dari perencanaan hingga realisasi, sehingga administrasi lebih terstruktur dan data terintegrasi.	implementasi SIPD memberikan kemudahan dalam pengelolaan kegiatan dan pelaporan

Implementasi SIPD melibatkan berbagai pihak dengan peran yang berbeda, yaitu pengguna anggaran sebagai penanggung jawab kebijakan, pejabat penatausahaan keuangan yang mengawasi pengelolaan anggaran, pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, bendahara yang mencatat realisasi anggaran, serta operator yang melakukan input data dan

dokumen ke dalam sistem. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa pengelolaan sistem dilakukan secara terkoordinasi dalam mendukung proses administrasi keuangan.

Secara operasional, implementasi SIPD mengikuti alur kerja berbasis *input*, *process*, dan *output*. Pada tahap *input*, data perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan realisasi anggaran diinput oleh masing-masing bidang ke dalam sistem sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pada tahap *process*, data yang telah diinput diproses secara otomatis melalui mekanisme validasi, verifikasi, dan sinkronisasi antar modul untuk menjaga konsistensi dan kesesuaian data. Namun demikian, pada tahap proses masih ditemukan beberapa kendala teknis, seperti gangguan server, keterbatasan jaringan internet, serta kesulitan dalam mengakses sistem. Kondisi ini berdampak pada kelancaran pengolahan data dan berpotensi memengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan. Pada tahap *output*, SIPD menghasilkan berbagai laporan keuangan, termasuk laporan realisasi anggaran yang digunakan sebagai dasar dalam monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Keberadaan sistem ini dinilai mampu meningkatkan keteraturan, integrasi, serta kemudahan dalam pengelolaan data keuangan. Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada stabilitas sistem dan konsistensi pengguna dalam melakukan penginputan data.

Implementasi SIPD dalam Mendukung Relevansi Laporan Pengelolaan Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berperan dalam meningkatkan relevansi laporan pengelolaan anggaran pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gianyar. SIPD memungkinkan proses pencatatan, pengelolaan, dan penyajian data keuangan dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih sistematis, konsisten, dan mudah diakses.

Tabel 2. Analisis Implementasi SIPD dalam Mendukung Relevansi Laporan Pengelolaan Anggaran

Informan	Hasil Wawancara	Reduksi Data	Penyajian Data	Kesimpulan
I1 (Kepala Dinas)	SIPD memudahkan akses data kegiatan dan anggaran	Data kegiatan tersimpan dalam sistem	Sistem menyediakan data untuk laporan	SIPD mendukung penyediaan informasi yang relevan
I2 (PPK)	Data laporan berasal dari sistem yang sama	Integrasi data dalam SIPD	Sistem mengurangi perbedaan data	SIPD meningkatkan konsistensi data laporan
I4 (Bendahara Pengeluaran)	Realisasi anggaran dicatat melalui SIPD	Pencatatan transaksi dalam sistem	Data realisasi tersedia untuk laporan	SIPD mendukung ketepatan informasi laporan
I5 (Operator SIPD)	Data kegiatan dan dokumen diinput ke SIPD	Data kegiatan tersimpan dalam sistem	Data mudah diakses untuk laporan	SIPD mempermudah penyusunan laporan
I3 (PPTK)	SIPD dapat digunakan untuk melihat capaian kegiatan	Data SIPD sebagai bahan evaluasi	Data sebagai bahan evaluasi dan perencanaan ke depan	SIPD memiliki nilai umpan balik (<i>feedback value</i>) dan nilai prediktif (<i>predictive value</i>) dalam mendukung pengambilan keputusan.

Sumber: Penulis 2026

Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan SIPD mendukung keseragaman sumber data dalam penyusunan laporan, sehingga dapat meminimalkan terjadinya perbedaan atau inkonsistensi data. Selain itu, data yang tersimpan dalam sistem dapat digunakan untuk melihat capaian kegiatan dan realisasi anggaran sebelumnya, sehingga membantu dalam proses evaluasi dan perencanaan. Analisis relevansi laporan dalam penelitian ini mengacu pada karakteristik kualitatif menurut PP No. 71 Tahun 2010, yaitu *feedback value*, *predictive value*, dan *timeliness*. Pada aspek *feedback value*, SIPD memudahkan penelusuran data historis sehingga mendukung evaluasi kinerja keuangan secara lebih sistematis. Pada aspek *predictive value*, data yang terstruktur dan konsisten dalam SIPD dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan anggaran dan pengambilan keputusan di masa mendatang. Sementara itu, pada aspek *timeliness*, penggunaan SIPD mempercepat proses penyusunan dan pelaporan keuangan karena seluruh data telah terintegrasi dalam satu sistem. Secara keseluruhan, implementasi SIPD telah mampu mendukung peningkatan relevansi laporan pengelolaan anggaran, khususnya dalam menyediakan informasi yang lebih terstruktur, konsisten, dan tepat waktu. Namun demikian, optimalisasi pemanfaatan sistem tetap diperlukan agar informasi yang dihasilkan dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan.

Kendala Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memberikan kemudahan dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran, masih terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas penggunaannya pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gianyar.

Tabel 3. Analisis Miles & Huberman Kendala Implementasi SIPD

Informan	Hasil Wawancara	Reduksi Data	Penyajian Data	Kesimpulan
I2 (PPK)	Tidak semua pegawai memahami penggunaan SIPD	Keterbatasan kemampuan SDM	Penggunaan sistem memerlukan pendampingan operator	Kendala SDM mempengaruhi implementasi SIPD
I5 (Operator SIPD)	Beberapa pegawai masih memerlukan penyesuaian penggunaan sistem	Adaptasi pengguna terhadap sistem	Pegawai belum terbiasa menggunakan sistem digital	Adaptasi sistem menjadi kendala awal
I4 (Bendahara Pengeluaran)	Sistem terkadang mengalami gangguan ketika banyak pengguna	Kendala teknis sistem	Sistem menjadi lambat saat digunakan	Gangguan teknis mempengaruhi proses input data
I5 (Operator SIPD)	Jaringan internet mempengaruhi akses SIPD	Ketergantungan pada internet	Sistem berbasis online	Koneksi internet mempengaruhi kinerja sistem

Sumber: Penulis 2026

Kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan aspek sumber daya manusia (SDM). Tidak semua pegawai memiliki kemampuan yang memadai dalam mengoperasikan sistem berbasis digital, sehingga dalam praktiknya masih terdapat ketergantungan terhadap operator SIPD dalam

Selain faktor teknis, proses adaptasi terhadap sistem baru juga menjadi tantangan tersendiri. Perubahan dari sistem manual ke sistem digital memerlukan waktu bagi pegawai untuk menyesuaikan diri dengan prosedur dan mekanisme kerja yang baru (I1). Proses adaptasi ini mencakup pemahaman alur sistem serta penggunaan fitur dalam aplikasi SIPD.

Triangulasi Data

Tabel 4. Triangulasi Implementasi SIPD

Informan	Pernyataan Utama	Kesimpulan
I1 (Kepala Dinas)	SIPD digunakan sebagai sistem utama dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran	SIPD telah diterapkan dalam pengelolaan organisasi
I2 (PPK)	SIPD digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan	Sistem mendukung pengelolaan anggaran
I4 (Bendahara Pengeluaran)	Realisasi anggaran dicatat melalui sistem SIPD	Sistem mempermudah pencatatan keuangan
I5 (Operator SIPD)	Seluruh data kegiatan diinput melalui sistem SIPD	Data tersimpan secara terintegrasi
I3 (PPTK)	SIPD membantu dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan	SIPD memudahkan monitoring kegiatan

40 | Hita_Akuntansidan Keuangan

Hasil triangulasi menunjukkan adanya konsistensi informasi antar informan mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gianyar. Seluruh informan menyatakan bahwa SIPD telah digunakan sebagai sistem utama dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. SIPD dimanfaatkan untuk pengelolaan data anggaran, pencatatan realisasi, penginputan dokumen, serta monitoring pelaksanaan kegiatan. Konsistensi temuan ini menunjukkan bahwa implementasi SIPD telah berjalan secara operasional dan terintegrasi dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, hasil triangulasi memperkuat bahwa penggunaan SIPD telah diterapkan secara menyeluruh dan menjadi sistem utama dalam proses administrasi keuangan di lingkungan organisasi.

Tabel 4.6 Triangulasi Relevansi Laporan

Informan	Pernyataan Utama	Kesimpulan
I2 (PPK)	SIPD membantu penyusunan laporan keuangan	Konsistensi data
I4 (Bendahara)	Data transaksi tercatat secara sistematis	Kelengkapan data
I5 (Operator SIPD)	Data dapat diakses dengan cepat	Kemudahan akses informasi
I3 (PPTK)	SIPD mempermudah pemantauan kegiatan	Ketepatan waktu informasi

Sumber; Penulis 2026

Hasil triangulasi menunjukkan adanya konsistensi informasi antar informan mengenai peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan relevansi laporan pengelolaan anggaran. SIPD dinilai mampu mendukung penyediaan data yang lebih sistematis, terstruktur, dan mudah diakses sehingga mempermudah proses penyusunan laporan keuangan. Selain itu, penggunaan SIPD juga meningkatkan kecepatan akses informasi serta memudahkan pemantauan pelaksanaan kegiatan, sehingga laporan yang dihasilkan lebih akurat dan tepat waktu. Konsistensi temuan ini menunjukkan bahwa implementasi SIPD berkontribusi dalam meningkatkan kualitas informasi laporan, khususnya dari aspek keteraturan data dan ketepatanwaktuan.

Dengan demikian, hasil triangulasi memperkuat bahwa SIPD berperan dalam mendukung relevansi laporan pengelolaan anggaran di lingkungan organisasi.

Tabel 4.7 Triangulasi Kendala Implementasi SIPD

Informan	Pernyataan Utama	Kesimpulan
I1 (Kepala Dinas)	Proses adaptasi terhadap sistem baru masih memerlukan waktu, terutama dalam memahami fitur-fitur dalam SIPD	Adaptasi Sistem
I4 (Bendahara)	Terkadang terjadi kendala pada jaringan yang menghambat proses input data	Kendala Teknis

I5 (Operator SIPD)	Sistem mengalami error atau loading lama saat digunakan pada jam tertentu	Kendala Sistem
I2 (Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK))	Masih terdapat kesulitan dalam penggunaan sistem bagi pegawai yang belum terbiasa	SDM

Sumber; Penulis 2026

Hasil triangulasi menunjukkan adanya konsistensi informasi antar informan terkait kendala dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kendala utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan jaringan internet, gangguan teknis sistem, serta kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem. Keterbatasan jaringan internet menyebabkan proses akses dan penginputan data menjadi terhambat, terutama ketika koneksi tidak stabil. Selain itu, kendala teknis seperti error sistem juga mempengaruhi kelancaran pengelolaan data. Dari sisi sumber daya manusia, masih terdapat pegawai yang belum terbiasa menggunakan sistem digital sehingga memerlukan pendampingan dalam proses operasional.

Temuan ini menunjukkan bahwa kendala adaptasi terhadap sistem baru serta faktor teknis menjadi hambatan utama dalam implementasi SIPD. Dengan demikian, hasil triangulasi memperkuat bahwa efektivitas penggunaan SIPD masih dipengaruhi oleh kesiapan teknologi dan kompetensi pengguna.

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gianyar telah diterapkan pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Sistem ini memungkinkan integrasi data kegiatan dan anggaran dalam satu platform sehingga pengelolaan menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Penerapan SIPD sejalan dengan upaya transformasi digital sektor publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi (Amalina, 2025). Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa sistem informasi dalam sektor publik mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan, akurasi data, serta mempercepat proses pelaporan (Nasution et al., 2025; Dasni et al., 2025). Selain itu, penggunaan teknologi digital turut mendukung transparansi dan efisiensi tata kelola pemerintahan (Khairati & Putra, 2024; Kumoro, 2026).

Lebih lanjut, SIPD mendukung integrasi seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, sehingga mempermudah koordinasi dan pemantauan kegiatan (Pamungkas et al., 2025). Dengan demikian, implementasi SIPD pada Dispora Kabupaten Gianyar telah berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan melalui sistem yang terintegrasi.

Implementasi SIPD dalam Mendukung Relevansi Laporan Pengelolaan Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gianyar, relevansi laporan keuangan melalui implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dianalisis berdasarkan tiga karakteristik utama sesuai PP No. 71 Tahun 2010, yaitu *feedback value*, *predictive value*, dan *timeliness*. Pada aspek *feedback value*, SIPD menyediakan data yang terdokumentasi secara lengkap dan sistematis sehingga memudahkan penelusuran informasi historis untuk evaluasi kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan konsep dalam PP No. 71 Tahun 2010 serta didukung oleh penelitian Dewi Kusuma Wardani (2021) dan Barth (2020) yang menekankan pentingnya fungsi umpan balik dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Pada aspek *predictive value*, data yang tersaji secara konsisten dalam SIPD memungkinkan analisis tren dan penyusunan proyeksi anggaran secara lebih akurat. Temuan ini menunjukkan bahwa SIPD telah mendukung nilai prediktif informasi keuangan sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010, serta sejalan dengan penelitian Budiasih (2022) dan Leuz (2020) yang menegaskan bahwa informasi akuntansi harus mampu mendukung perencanaan dan prediksi di masa depan. Selanjutnya, pada aspek *timeliness*, implementasi SIPD meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan melalui sistem yang terintegrasi, sehingga informasi dapat tersedia secara lebih cepat dan efisien. Hal ini sesuai dengan karakteristik *timeliness* dalam PP No. 71 Tahun 2010, serta didukung oleh penelitian Haryani (2023) dan Ng (2021) yang menyatakan bahwa ketepatan waktu merupakan faktor penting dalam meningkatkan relevansi laporan keuangan.

Dengan demikian, implementasi SIPD pada Dispora Kabupaten Gianyar telah mendukung relevansi laporan keuangan dari aspek *feedback value*, *predictive value*, dan *timeliness*. Faktor pendukung seperti kelengkapan data, konsistensi informasi, dan kemudahan akses turut memperkuat kualitas informasi yang dihasilkan.

Kendala Implementasi SIPD

Meskipun implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memberikan berbagai manfaat dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran, penelitian ini menemukan beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas penggunaannya pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gianyar. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, gangguan teknis sistem, serta ketergantungan terhadap jaringan internet. Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem berbasis digital menjadi salah satu hambatan utama. Hal ini sejalan dengan penelitian Cahyanti dan Werastuti (2024) yang menyatakan bahwa rendahnya kemampuan teknologi informasi pegawai dapat menghambat optimalisasi penggunaan

SIPD. Selain itu, kendala teknis seperti ketidakstabilan sistem serta keterbatasan infrastruktur teknologi turut mempengaruhi kelancaran implementasi. Temuan ini didukung oleh penelitian Novianti dan Falah (2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi pemerintahan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi dan dukungan infrastruktur.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi SIPD memerlukan dukungan yang komprehensif, meliputi peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai, serta koordinasi yang efektif antarunit kerja.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gianyar telah diterapkan pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Penggunaan SIPD mampu meningkatkan keterpaduan dan sistematika pengelolaan data kegiatan dan anggaran, meskipun belum sepenuhnya optimal akibat kendala teknis dan keterbatasan pemahaman pengguna. Dalam mendukung relevansi laporan pengelolaan anggaran, SIPD telah memenuhi karakteristik kualitatif informasi berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, yaitu *feedback value*, *predictive value*, dan *timeliness*. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, dasar perencanaan, serta disajikan secara lebih tepat waktu. Namun demikian, relevansi laporan masih belum maksimal akibat kendala dalam penginputan data, gangguan sistem, dan belum optimalnya pemanfaatan fitur SIPD. Adapun kendala utama dalam implementasi SIPD meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, gangguan teknis sistem, serta ketergantungan terhadap jaringan internet. Kendala tersebut berdampak pada keterlambatan dan potensi ketidaktepatan informasi dalam laporan pengelolaan anggaran.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa keberhasilan implementasi SIPD tidak hanya ditentukan oleh sistem yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur. Optimalisasi SIPD dapat meningkatkan kualitas dan relevansi informasi laporan keuangan daerah sebagai dasar pengambilan keputusan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang hanya berfokus pada satu organisasi perangkat daerah, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga sangat bergantung pada persepsi informan.

Saran

Daftar Pustaka

- 45 | Hita Akuntansidan Keuangan

- Ng, J. (2021). The role of timeliness in financial reporting relevance. *Contemporary Accounting Research*, 38(3), 1675–1702.
- Novianti, R., & Falah, S. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 30–42.
- Nugroho, R., & Prabowo, H. (2023). Relevansi informasi laporan keuangan sektor publik dalam pengambilan keputusan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 12(2), 120–132.
- Pamungkas, A., Supartini, N., & Abdullah, R. (2025). Implementasi SIPD dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 10(1), 50–60.
- Pramuki, A., et al. (2025). Tata kelola keuangan daerah berbasis sistem informasi. *Jurnal Manajemen Publik*, 13(1), 25–37.
- Puspitasari, D. (2023). Sistem informasi akuntansi sebagai pendukung pengambilan keputusan. *Jurnal Teknologi Informasi*, 8(1), 66–75.
- Sari, M. (2021). Komponen sistem informasi akuntansi dalam organisasi modern. *Jurnal Sistem Informasi dan Akuntansi*, 5(2), 90–100.
- Septiani, R. (2025). Penerapan sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Modern*, 11(1), 40–52.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, L. (2021). Kualitas informasi laporan keuangan sektor publik. *Jurnal Akuntansi Publik*, 6(1), 12–20.
- Wardani, D. K. (2021). Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 8(1), 45–56.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.